

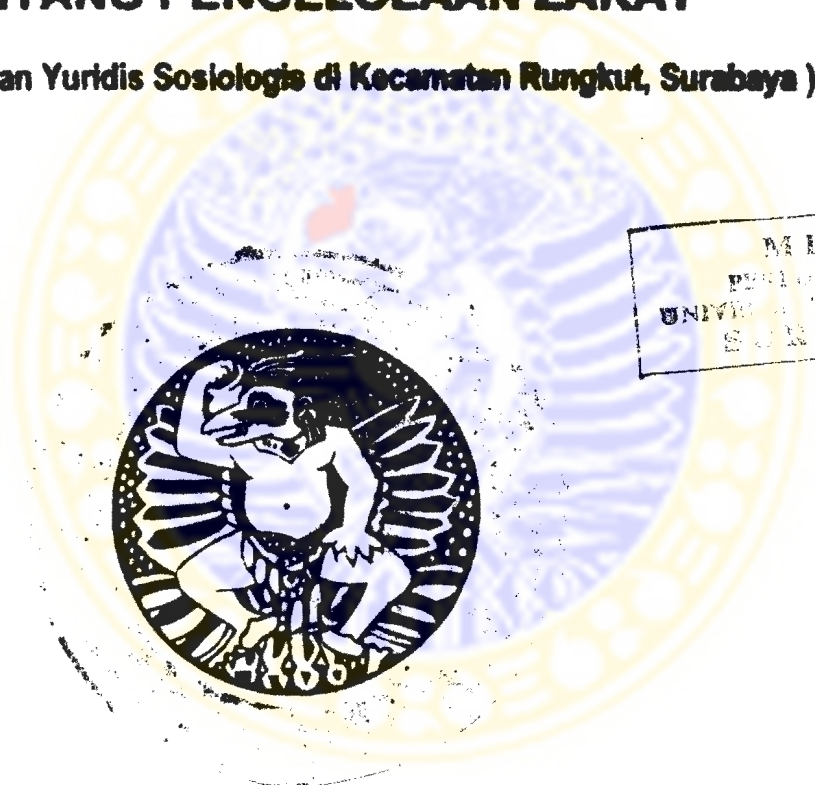
KIK  
Per 10/01  
Wic  
K

**SKRIPSI**

**RANTI WIRASHINTA**

**KEEFEKTIFAN  
UNDANG - UNDANG NO.38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**( Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis di Kecamatan Rungkut, Surabaya )**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**KEEFEKTIFAN  
UNDANG - UNDANG NO.38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**( Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis di Kecamatan Rungkut, Surabaya )**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR**  
**PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**Liliek Kamilah, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 130531799**

**Ranti Wirashinta**  
**NIM. 039714482**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2001**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab III dan dari hasil pengamatan di lapangan khususnya di kecamatan Rungkut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum dilaksanakan secara efektif bahkan ada beberapa pengurus takmir' masjid yang sama sekali belum mengetahui keberadaan undang-undang ini, sekalipun sudah berlangsung satu tahun.
- b. Adapun kendala yang di hadapi adalah penegak hukumnya sendiri di samping budaya masyarakat yang beranggapan bahwa masalah zakat adalah salah satu rukun Islam sehingga tidak perlu banyak di atur. Sedang para penegak hukumnya sendiri kurang bergairah dalam mensosialisasikan undang-undang ini sehingga belum banyak yang memahami dan melaksanakan UU No. 38 tahun 1999 ini.
- c. Pelaksanaan zakat yang berlangsung, sebagian besar masih menggunakan peraturan hukum yang lama di samping pelaksanaan

zakat yang bersifat konvensional, walaupun sudah ada beberapa tokoh masyarakat yang duduk sebagai pengurus takmir' masjid yang sudah mendakwakan zakat ini

## **2. Saran**

- a. Agar UU No. 38 tahun 1999 dapat berlaku efektif di masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Rungkut maka di harapkan Departemen Agama segera melakukan pembentukan tim penyuluh untuk mensosialisaikan undang-undang tersebut dan melakukan pengkajian ulang terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.
- b. Pemerintah melalui Departemen Agama perlu menyediakan dana khusus untuk mensosialisasikan UU No. 38 tahun 1999 agar undang-undang ini berlaku secara efektif.
- c. Departemen Agama perlu mempercepat pembentukan BAZIS di tingkat propinsi, kabupaten maupun kecamatan.

